



Media Massa : Radar Hari : Kamis Tanggal : 12 Juni 2014

Apresiasi Wali Kota Tak Jadi Timses Capres

Jaga Roda Pemerintahan Stabil

Keputusan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti untuk tidak ambil bagian dalam tim sukses (timses) salah satu pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) dinilai tepat. Langkah itu penting untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan yang sedang berlangsung.

GURU Besar Ilmu Pemerintahan UGM Jogjakarta Prof Purwo Santoso memberi apresiasi atas sikap wali kota yang berasal dari Partai Golkar tersebut #
Baca Jaga... Hal 11

3. Positif Segera Untuk Diketahui

Mungkin Sungkan dengan Wali Kota Lama

■ JAGA...

Sambungan dari hal 1

"Bila Wali Kota Jogja tidak ambil bagian (dalam timses capres) itu bagus. Kepala daerah yang berasal dari orang partai seharusnya menggunakan sarana, waktu, dan komitmen hanya untuk kepentingan publik, bukan lagi kepentingan privat (politik, red)," kata Prof Purwo kemarin (11/6).

Prof Purwo mengatakan, kepala daerah sebenarnya memiliki hak politik untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Tapi, lanjutnya, alangkah lebih baik jika kepala daerah tidak menggunakan kekuasaan untuk menggiring orang lain memilih pasangan tertentu.

Waktu yang ada, tegas dia, lebih baik digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau beliau tidak terang-terangan mendukung siapa-siapa, itu bagus. Selama ini *kari* masih banyak yang menggunakan kesempatan yang setengah resmi untuk melakukan kampanye," jelasnya.

Menurut Prof Purwo, bukan hal tabu bagi kepala daerah untuk menjadi timses capres-ca-

wapres yang didukung oleh partai politiknya. Hanya, bila kepada daerah melakukan hal tersebut maka harus mengajukan cuti. Mereka juga tidak boleh menggunakan atribut negara sebagai media kampanye.

Untuk kepala daerah yang menjadi bagian timses kampanye capres-cawapres, Prof Purwo berharap harus dapat memberikan ide-ide yang baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Dia berharap timses yang berasal dari kepala daerah bukan lagi membangun citra palsu supaya masyarakat memilih capres yang didukung.

"Kalau kepala daerah berkampanye levelnya untuk memenangkan kandidat tertentu terlalu murahan. Harus ada ide gagasan yang disampaikan. Seandainya kandidatnya kalah, setidaknya bisa dijadikan sumber untuk membangun sebuah kebijakan," jelasnya.

Hal senada disampaikan dosen Ilmu Pemerintahan UMY Jogjakarta Zuly Qodir. Menurutnya, "penolakan" wali kota menjadi timses berdampak baik dalam jalannya birokrasi di Pemkot Jogja.

"Kepala daerah yang menjadi

bagian dari timses akan berpengaruh pada psikologis orang-orang di sekitar. Akan tampak jelas teman dan lawan. Ini menjadi tidak baik terhadap lingkungan," kata Zuly.

Menurut Zuly, penolakan HS untuk tidak menjadi timses salah satu capres bisa jadi dikanrenakan wilayah Kota Jogja yang tidak terlalu luas dan pemilihnya tidak sebanyak di kabupaten lain.

"Bisa juga HS *sungkan* untuk terlibat karena wali kota sebelumnya juga telah mendukung pasangan yang didukung oleh Partai Golkar," terangnya.

Pelayanan Pemkot Tetap Maksimal

Ketegasan sikap yang diambil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti terkait penolakan menjadi juru kampanye dalam Pilpres 2014 juga mendapatkan apresiasi dari pegawai di lingkungan pemkot. Salah satu dukungan datang dari Kepala Bagian Humas Kota Jogja Tri Hastono.

Pejabat yang akrab disapa Kelik itu mengatakan, sikap HS sebagai kepala daerah Kota Jogja layak diapresiasi. Apalagi, keputusan HS itu berbeda dengan kepala daerah di banyak wi-

layah di Indonesia yang memilih menjadi jurkam.

Sikap itu, menurutnya, bukan berarti Kota Jogja ada perbedaan sikap antara wali kota dan wakil wali kota. Dia menilai, perbedaan sikap yang diambil wali kota dan Wawali justru menjadikan perbedaan menjadi nikmat.

Menurutnya, selama pelaksanaan kampanye pilpres pemerintahan berjalan maksimal. Kinerja pegawai pemkot dan pelayanan seperti saat berlangsung kampanye dan coblosan Pileg 2015 lalu.

"Sikap yang diambil Pak Wali untuk tidak menjadi jurkam dan lebih memilih sebagai pelayan masyarakat, perlu kita apresiasi. Netralitas dari wali kota ini sangat tepat," kata Kelik di kantornya.

Terpisah, beberapa pegawai negeri sipil di Kota Jogja juga menyatakan mendukung sikap netral wali kota dalam kampanye pilpres. Mereka salut dengan langkah wali kota untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

"Saya dukung Pak Wali Kota seratus persen untuk bersikap netral saat kampanye pilpres," ucap seorang pegawai pemkot yang minta identitasnya tidak disebutkan. (bhn/hrp/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005